



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Utara Periode 2010-2022

Dwi Anggriani

Universitas Negeri Medan

Shabilla Aisyah

Universitas Negeri Medan

Wandira Anzani

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jln. William Iskandar, Pasar V Medan Estate

Korespondensi penulis: dwianggraini001@gmail.com

Abstrak. *The aim of this research is to examine how government spending and GDP affect North Sumatra's Original Regional Income (PAD) between 2010 and 2022. Multiple linear regression and the 95% significance threshold are two data analysis approaches used in the quantitative research approach. The findings of the simultaneous analysis show that GDP and government spending at current prices significantly and favorably affect North Sumatra's PAD. Government spending has a sizable and beneficial impact on North Sumatra's PAD, to a certain extent. Nevertheless, during 2010–2022, North Sumatra's PAD is positively influenced by current GDP in an insignificant way.*

Keywords: *Government Expenditure, GRDP at Current Prices, Original Regional Income (PAD).*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengeluaran pemerintah dan PDB mempengaruhi Pendapatan Daerah Asli (PAD) Sumatera Utara antara tahun 2010 dan 2022. Regresi linier berganda dan ambang signifikansi 95% adalah dua pendekatan analisis data yang digunakan dalam pendekatan penelitian kuantitatif. Temuan analisis simultan menunjukkan bahwa PDB dan pengeluaran pemerintah pada harga saat ini secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi PAD Sumatera Utara. Pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang cukup besar dan menguntungkan pada PAD Sumatera Utara, sampai batas tertentu. Meskipun demikian, selama tahun 2010–2022, PAD Sumatera Utara dipengaruhi secara positif oleh PDB saat ini dengan cara yang tidak signifikan.

Kata Kunci: *Pengeluaran Pemerintah, PDRB Harga Berlaku, Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah dan harga PDB adalah dua faktor signifikan yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, negara yang menjadi lebih terdesentralisasi. Alokasi anggaran untuk sejumlah bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, termasuk dalam pengeluaran pemerintah dan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi penerimaan daerah dari pajak dan pungutan yang dikenakan pada berbagai kegiatan ekonomi juga dipengaruhi oleh PDB harga yang berlaku, sebuah statistik ekonomi yang mewakili nilai total produk dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah (Melda & Syofyan, 2020; Pratiwi & Hutajulu, 2022).

Secara umum, PAD berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk membayar berbagai layanan publik dan inisiatif pembangunan. Pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan, seperti PAD, yang berasal dari pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, lebih bebas berkat otonomi daerah (Hasni, 2019; Pratiwi & Hutajulu, 2022). Menurut penelitian lain, pengeluaran pemerintah yang efisien dapat meningkatkan PAD, terutama dalam hal pendanaan layanan publik dan infrastruktur yang mendorong ekspansi ekonomi (Merri & Soleh, 2015; Munawar, 2021). Mengingat ekspansi

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Utara Periode 2010-2022

ekonomi yang didorong oleh industri penting termasuk pariwisata, manufaktur, dan pertanian, belanja pemerintah di Sumatera Utara selama periode 2010-2022 berpotensi berdampak besar pada PAD (Muliati et al., 2019; Suprayitno et al., 2017).

Efek flypaper, yang menyatakan bahwa daerah sering mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah daripada memaksimalkan potensi PAD, membantu menjelaskan hubungan antara belanja pemerintah dan PAD (Triya & Sari, 2021; Kustianingsih et al., 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana ketergantungan pada uang pusat dapat menghambat kemandirian fiskal daerah meskipun pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan PDB harga yang relevan dalam menentukan PAD di Sumatera Utara dan untuk menilai keberhasilan kebijakan fiskal yang diberlakukan selama waktu itu (Ulumudin & Khaerani, 2020; Yogyakarta & Yogyakarta, 2021).

TAHUN	PENGELUARAN PEMERINTAH (X1)	PDRB Harga Berlaku (X2)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Y)
2010	3666.70	275057	3885.63
2011	4611.47	314372	4958.48
2012	7633.63	417120	7201.83
2013	7260.47	469460	7397.99
2014	7808.56	521921	7772.03
2015	7959.17	571720	8480.76
2016	9476.42	628391	10440.62
2017	12518.86	684073	12234.83
2018	12563.39	741350	12703.06
2019	13440.32	799610	13079.59
2020	12653.60	811280	12916.36
2021	13225.39	859870	14034.03
2022	12649.62	955193	12011.62

Menurut angka-angka di atas, pendapatan daerah terbesar Sumatera Utara sebesar \$14.034,03 miliar, total belanja pemerintah sebesar \$1322,39 miliar, dan PDB sebesar 859870 tercatat pada tahun 2021. Dengan PDB 275057 miliar dan total belanja pemerintah sebesar 3666,70 miliar, penerimaan daerah Sumatera Utara mencapai titik terendah pada tahun 2010 sebesar 3.885,63 miliar. Terbukti dari data bahwa Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara meningkat dan menurun antara tahun 2010 dan 2022. Pendapatan asli Wilayah Sumatera Utara terus meningkat antara tahun 2010 dan 2019. Namun, Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara turun pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19 tahun itu, yang berdampak negatif pada kerangka makroekonomi daerah dan kedudukan ekonomi penduduk Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Namun, pendapatan asli Wilayah Sumatera Utara kembali naik pada tahun 2021 sebelum turun lagi pada tahun 2022. Kenaikan dan penurunan pendapatan disebabkan oleh pandemi Covid-19, yang berdampak pada pendapatan ekonomi Sumatera Utara secara keseluruhan, disparitas penerimaan pendapatan dari masing-masing kabupaten dan kota di provinsi tersebut, serta oleh pajak daerah, pungutan daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang berbeda, dan penerimaan asli daerah lainnya yang sah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh belanja pemerintah dan PDB terhadap PAD di Sumatera Utara selama periode 2010-2022. Melalui analisis ini,

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika keuangan daerah dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan regional dari Pendapatan Asli Regional yang sah terdiri dari Pendapatan Asli Regional (PAD), sumber regional yang diekstraksi dari dalam wilayah regional yang saling berhubungan (Rooy & Buldiarso, 2015). Salah satu ukuran tingkat kemandirian suatu wilayah adalah pendapatan asli regionalnya. Menurut Tolosang (2018), ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah federal berkurang ketika pendapatan PADnya meningkat. Sebaliknya, semakin besar ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah federal, semakin kecil pendapatan PAD di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa PAD adalah aliran pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah daerah dan mengalir ke pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa PAD adalah aliran pendapatan regional yang berasal dari lokal.

Menurut Halim (2001), pendapatan asli daerah (PAD) adalah uang yang diterima daerah dari sumber-sumber di dalam perbatasannya sendiri dan yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. Pajak daerah, retribusi regional, keuntungan bisnis milik regional, hasil dari manajemen kekayaan regional yang terpisah, dan PAD hukum lainnya adalah empat bentuk pendapatan berbeda yang membentuk PAD. Meskipun penerimaan asli daerah (PAD) seharusnya menjadi sumber pendanaan utama untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, namun saat ini tidak mencukupi, yang berarti pangsa dari total pendapatan daerah (TPD) masih cukup kecil.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jumlah total uang yang diterima yang dialokasikan dengan tepat, terasa seperti tambahan dari total aset dalam satu tahun fiskal, dan tidak memerlukan penggantian oleh entitas publik. Idris (2016) Semua daerah pembayaran uang yang dianggap memiliki Nilai Aktiva Bersih yang berlebihan dalam satu tahun fiskal dan yang tidak akan diganti oleh otoritas publik termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (PAD). Menurut Idris (2016), tuntutan pemerintah daerah tidak boleh menaikkan biaya produksi di atas uang pajak yang diterima oleh anggota parlemen lingkungan. Semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah disebut sebagai pendapatan asli daerah.

Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan pada ayat 1 dan 2 bahwa sumber pendapatan daerah meliputi bukan pajak, bagi hasil pajak, dan penerimaan asli daerah. Klasifikasi penerimaan asli daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 meliputi: Pajak lokal, dalam rangka mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memberlakukan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah sendiri terbagi dalam dua kategori: pajak negara bagian, yang dikelola dan digunakan oleh daerah, dan pajak daerah, yang ditetapkan oleh aturan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, biaya billboard, pajak penerangan jalan, dan biaya parkir adalah beberapa kategori pajak kabupaten/kota sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah, salah satu cara untuk mengkarakterisasi retribusi regional adalah sebagai biaya untuk layanan atau izin tertentu yang ditawarkan pemerintah untuk penggunaan pribadi atau bisnis. Pajak layanan publik, retribusi layanan komersial, dan biaya lisensi khusus adalah tiga kategori retribusi regional.

Menurut Kuncoro (2004), sentralisasi pajak yang tinggi dan kegagalan korporasi daerah atau badan usaha milik daerah untuk berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah adalah

penyebab utama rendahnya PAD, yang pada akhirnya berujung pada ketergantungan pada pemerintah pusat. Beberapa pajak daerah dapat digunakan sebagai sumber pendapatan utama, meskipun ada banyak jenis yang berbeda. Orang-orang khawatir jika daerah tersebut mendapatkan banyak uang, itu akan menyebabkan kemandirian dan fragmentasi. Jika situasi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat terus berlanjut, beban anggaran pemerintah pusat akan meningkat. Keempat komponen PAD tersebut meliputi pajak daerah, pungutan daerah, kinerja usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah, serta PAD lain yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Neraca Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Pemerintah

Setiap anggota masyarakat bercita-cita untuk kemakmuran material dan spiritual dalam arti bahwa kebutuhan dan keinginan mereka yang terus berubah dapat dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan mencari keamanan (termasuk stabilitas), keadilan, dan kemakmuran; Dalam hal ini, tindakan pemerintah diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka memuaskan keinginan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan penggunaan uang serta komoditas dan jasa dalam berbagai bentuk. Belanja pemerintah didefinisikan sebagai pemanfaatan dana untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah (Antoniuls, 2023).

Pengeluaran pemerintah mencakup semua pengeluaran pemerintah. Belanja pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori: pengeluaran pembayaran transfer dan belanja konsumsi pemerintah. Sementara pembangunan daerah adalah subsistem dari sistem pembangunan nasional, pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup semua pengeluaran pemerintah di mana pemerintah mendapatkan layanan sebagai imbalan atas pengeluaran tersebut. (2019, Nahumuri) Sebagai ilustrasi, pertimbangkan akuisisi langsung pemerintah atas prestasi kerja pekerja publik untuk membayar gaji mereka. Sementara pengeluaran pembayaran transfer adalah sejenis pengeluaran pemerintah di mana pemerintah tidak secara langsung mendapatkan layanan timbal balik untuk pengeluaran tersebut, jenis pengeluaran konsumsi pemerintah ini sering disebut sebagai pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah menawarkan subsidi, beasiswa, bantuan bencana alam, dan lainnya (Ramli, 2022). Mayoritas pengeluaran pemerintah didanai oleh uang pajak. Pengeluaran pemerintah terutama dilakukan untuk kemajuan masyarakat, bukan pengeluaran rumah tangga, yang membeli produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga mereka. Guru dan dokter dibayar oleh pemerintah untuk bekerja dan melayani masyarakat dengan menawarkan layanan medis dan pendidikan.

Seperti yang dikatakan Adam Smith dalam Aries Djaenuri (2016), secara khusus: (1). Menurut prinsip moralitas, pengeluaran pemerintah harus konsisten dengan prinsip-prinsip moral yang lurus; (2). Prinsip nasionalisme menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah harus bersifat nasional dan mempertimbangkan kepentingan rakyat (3). Menurut prinsip demokrasi atau populis, pengeluaran pemerintah harus menghormati kedaulatan rakyat dan memperhitungkan kepentingan mereka; (4). Prinsip rasionalitas menyatakan bahwa belanja pemerintah harus rasional dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya serta berdasarkan alasan yang terdefinisi dengan baik; (5) prinsip fungsionalitas menyatakan bahwa belanja pemerintah harus didasarkan pada fungsi yang telah ditentukan; (6). Gagasan di balik pengembangan belanja pemerintah adalah bahwa itu harus mengikuti kemajuan bangsa dan dunia (7). Menurut prinsip keadilan dan keseimbangan, pengeluaran pemerintah harus mempertimbangkan proporsi kegiatan non-fisik terhadap fisik untuk menumbuhkan kerukunan dan niat baik di antara pemerintah. Peningkatan permintaan layanan pemerintah dari penerima layanan, peningkatan pasokan layanan

pemerintah dari penerima layanan, dan peningkatan inefisiensi dalam pemberian layanan adalah tiga variabel yang mendorong perluasan belanja pemerintah. Dari perspektif ini, pemerintah harus mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk dijadikan landasan untuk mencari tahu berapa banyak yang harus dibelanjakan. Mengingat hal ini, draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disiapkan.

Dalam kerangka teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terbagi dalam tiga kategori utama: pembiayaan barang dan jasa, gaji karyawan, dan pembayaran transfer, seperti pembayaran bunga/pinjaman, pembayaran pensiun, atau subsidi atau bantuan langsung kepada kelompok orang yang berbeda.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku

Jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari semua sektor ekonomi di suatu daerah dikenal sebagai produk daerah bruto, berdasarkan harga pasar. Nilai tambah yang dihasilkan dari kombinasi bahan baku dan faktor produksi selama proses produksi dikenal sebagai nilai tambah. Nilai produksi (output) dikurangi biaya menengah adalah besaran nilai tambah. Di sini, variabel pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan laba), depresiasi, dan pajak tidak langsung bersih semuanya termasuk dalam nilai tambah bruto. Oleh karena itu, berdasarkan harga pasar, Produk Domestik Regional Bruto akan dihitung dengan menambahkan nilai tambah bruto masing-masing sektor dan nilai tambah bruto semua sektor. (BPS, 2012).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan PDB sebagai nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah, atau sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk semua bidang bisnis di suatu wilayah. Menurut Tarigan, total nilai tambah bruto yang dihasilkan dari semua faktor ekonomi daerah adalah definisi PDB. Nilai produksi (output) dikurangi biaya menengah adalah apa yang disebut sebagai nilai tambah bruto.

Ada dua pendekatan untuk menghitung PDB: langsung dan tidak langsung (alokasi). Pendekatan langsung yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Metode Alokasi atau Metode Tidak Langsung Dengan pendekatan ini, PDB suatu wilayah ditentukan dengan mengalokasikan porsi PDB yang lebih besar ke wilayah tersebut. Nilai output kotor atau bersih dari setiap sektor atau subsektor di daerah yang ditentukan, kuantitas produksi fisik, tenaga kerja, populasi, dan alokasi tidak langsung lainnya adalah di antara alokasi yang digunakan untuk mendistribusikan PDB wilayah ini.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Data

Temuan baru yang dapat dicapai (diperoleh) melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi (mengukur) lainnya adalah hasil penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif untuk penelitian lebih berfokus pada sejumlah gejala yang memiliki ciri-ciri tertentu dalam keberadaan manusia, terutama variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, teori objektif dan teknik uji statistik akan digunakan untuk menyelidiki sifat hubungan antara variabel. Salah satu jenis penelitian yang metodis, terorganisir, dan terstruktur adalah penelitian kuantitatif (Nugroho, 2018). Pendekatan kuantitatif kadang-kadang disebut sebagai pendekatan tradisional. Karena penggunaannya yang luas, teknik kuantitatif telah memantapkan dirinya sebagai tradisi penelitian.

2. Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara, yang akan diperiksa untuk mengetahui bagaimana belanja pemerintah dan harga Pengadaan

Domestik Regional Bruto (RDRB) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sugiyono (2018:130) menyatakan bahwa populasi sebagai suatu wilayah pada umumnya terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti. "Sampel adalah bagian dari jumlah dan kualitas yang dimiliki oleh populasi," menurut Sugiyono (2019, 127). 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara berfungsi sebagai ukuran sampel penelitian.

3. Teknik Analisis Data

1. Uji Regresi Linier Berganda "Regresi linier berganda adalah metode regresi berganda di mana jumlah variabel independen digunakan lebih dari satu untuk mempengaruhi satu variabel non-independen (dependen)," menurut Siregar (2017, 226).
2. Uji Koefisien Penentuan R Kuadrat Koefisien penentuan adalah angka yang menunjukkan sejauh mana perubahan atau variasi dalam variabel independen dapat menjelaskan perubahan atau variasi dalam variabel dependen, menurut Purnomo (2019, 31).
3. Uji regresi parsial, atau uji-t "Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah faktor independen memiliki efek sebenarnya pada variabel dependen sampai batas parsial," kata Mulyono (2018, 113). Tes ini satu arah dan dilakukan dengan hipotesis berikut, dengan tingkat signifikansi 0,05: $H_0: \beta_1 = 0$ menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen. $H_a: \beta_1 < 0$ atau $\beta_1 > 0$ Ini menunjukkan bahwa variabel independen berdampak pada variabel dependen.
 1. Jika t dihitung $<$ tabel t , maka variabel independen tidak memiliki efek substansial pada variabel dependen, oleh karena itu H_0 diterima dan H_a ditolak.
 2. Jika t dihitung $>$ tabel, maka variabel independen memiliki dampak yang cukup besar pada variabel dependen, oleh karena itu H_0 ditolak dan H_a disetujui.
4. Tes Regresi Simultan (Tes F) "Uji F dirancang untuk mengetahui bahwa variabel independen secara bersamaan memiliki efek substansial pada variabel dependen," kata Mulyono (2018, 113). 0,05 adalah tingkat kepercayaan yang digunakan. Standar berikut berlaku untuk pengujian hipotesis: Jika F dihitung $<$ tabel F atau nilai $sig >$, maka H_0 dapat diterima. 0,05 Jika F dihitung lebih besar dari 0, H_0 ditolak. Nilai $sig <$ 0,05 atau tabel F

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan fase yang paling krusial dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data," kata Sugiyono (2019, 296). Tujuan dari metode pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan data yang akurat, valid, dan dapat dipercaya sehingga validitas hasil penelitian tidak dapat disangkal. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder, yang meliputi informasi yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) antara tahun 2010 dan 2022. Pendapatan Asli Regional (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDB) dengan harga yang sesuai, dan statistik belanja pemerintah semuanya digunakan oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi (R) dipakai untuk mengukur seberapa besar kaitan linier variabel bebas yang diteliti pada variabel terikat. Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Koefisiensi Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.981	.977	509.66685
a. Predictors: (Constant), PDRB Harga Berlaku, Pengeluaran pemerintah				

Dari Model Summary diatas menjelaskan bahwasanya nilai koefisien regresi berganda (R) sebesar 0,990 dan juga nilai koefisien determinasi regresi berganda (R Square) sebesar 0,981. Artinya 98,1% pendapatan asli daerah dapat dijelaskan melalui variasi nilai variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB harga berlaku. Sedangkan sisanya (100% - 98,1%) = 1,9% dipengaruhi variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Regresi Secara Simultan

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar dampak variabel-variabel independen secara simultan pada variabel dependen. Hasil dari Uji Statistik F dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132241744.991	2	66120872.495	254.546	.000 ^b
	Residual	2597602.968	10	259760.297		
	Total	134839347.959	12			
a. Dependent Variable: PAD						
b. Predictors: (Constant), PDRB Harga Berlaku, Pengeluaran pemerintah						

Hipotesis X1 dan X2 terhadap Y

Ha = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah dan PDRB harga berlaku pada pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

Ho = Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan pengeluaran pemerintah dan PDRB harga berlaku pada pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

Dari Tabel Anova di atas menjelaskan bahwa uji signifikansi koefisien regresi berganda atau uji simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 254,546 dan F tabel untuk $\alpha = 0,05$ $df_1 = 2$ $df_2 = 10$ yaitu $F_{tab}(0,05,2:10) = 4,10$. Sehingga $F_{hitung}(254,546) > F_{tab}(4,10)$ maka **Ha diterima**. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah dan PDRB harga berlaku pada pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Utara Periode 2010-2022

Uji Regresi Secara Parsial (t)

Uji t dipakai untuk mengukur dampak variabel independen pada variabel dependen, serta untuk menganalisis pengaruh secara individual atau parsial. Hasil dari pengujian parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	330.691	451.277		.733	.481
	Pengeluaran pemerintah	.921	.140	.936	6.578	.000
	PDRB Harga Berlaku	.001	.002	.057	.401	.697

a. Dependent Variable: PAD

1) Persamaan Regresi

Pada kolom B diketahui Constant sebesar 330.691 dan Koefisien Regresi Pengeluaran Pemerintah sebesar (0,921) dan PDRB Harga Berlaku sebesar 0,001 .

Jadi persamaan regresi $Y = 330.691 + 0,921 + 0,001$

- a. Kostanta sebesar 330.691, artinya jika Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Harga Berlaku adalah 0, maka PAD 330.691 Milyar
- b. Koefisien regresi variable Pengeluaran Pemerintah sebesar 0,921. Artinya setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1%, maka PAD akan meningkat sebesar 0,921 Milyar.
 - Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa semakin meningkat Pengeluaran Pemerintah, maka PAD semakin meningkat.
- c. Koefisien regresi variable PDRB Harga Berlaku sebesar 0,001. Artinya setiap kenaikan angka PDRB Harga Berlaku sebesar 1%, maka PAD akan meningkat sebesar 0,001 Milyar.
 - Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa semakin meningkat angka, PDRB Harga Berlaku, maka PAD semakin meningkat.

Hipotesis X1 terhadap Y (Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah)

Ha = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

Ho = Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

Hipotesis X2 terhadap Y (PDRB Harga Berlaku terhadap Pendapatan Asli Daerah)

Ha = Terdapat pengaruh positif dan signifikan PDRB Harga Berlaku terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

Ho = Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan PDRB Harga Berlaku terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

1. Berdasarkan Hipotesis X1 terhadap Y

Hasil uji t memperlihatkan bahwa nilai t-hitung mencapai 6.578 melalui nilai signifikansi ($\alpha=0,05$) dan nilai t-hitung sebesar 1,81246. Sehingga t-hitung ($6.578 > 1,81246$)

maka **Ha diterima**. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

2. Berdasarkan Hipotesis X2 terhadap Y

Hasil uji t memperlihatkan bahwa nilai t-hitung mencapai 0.401 melalui nilai signifikansi ($\alpha=0,05$) dan nilai t-hitung sebesar 1,81246. Sehingga t-hitung ($0.401 < t\text{-tabel}$ (1,81246) maka **Ha ditolak**. Artinya Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan PDRB Harga Berlaku terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022.

Pembahasan

Model yang dipakai dalam penelitian ini dengan tingkat signifikansi 95% menunjukkan bahwa berdasarkan analisis simultan (uji F) dengan ($\alpha=0,05$), maka F hitung (254,546) > F tab (4,10). Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah dan PDRB harga berlaku secara bersamaan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gufron Reynaldin Sunandar (2017) menyatakan bahwa PDRB, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan investasi secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan analisis regresi secara parsial (uji t), yaitu:

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut tabel uji regresi secara parsial di atas, dilihat bahwa nilai t-hitung (6,578) > t-tabel (1,81246), yang memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022. Wagner telah mengemukakan teori bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat, secara relatif pendapatan perkapita pun akan meningkat. Didukung dengan teori Peacock dan Wiseman bahwa pemerintah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melakukan Pembangunan.

Hasil penelitian variabel juga didukung oleh Kurniawan et al., (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanti et al., (2017) dan Perwira et al., (2018) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah

2. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut tabel uji regresi secara parsial di atas, bisa dilihat bahwa nilai t-hitung (0,401) < t-tabel (1,81246) artinya terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan PDRB Harga Berlaku terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara periode 2010-2022. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gufron Reynaldin Sunandar (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014)”. yang menyatakan bahwa PDRB dengan PAD memiliki hubungan positif dan signifikan. Artinya semakin besar PDRB yang diterima, maka semakin besar pula PAD yang diterima oleh satu kabupaten/ kota Provinsi DIY.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Utara Periode 2010-2022

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Pengeluaran pemerintah secara signifikan dan menguntungkan terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Utara dari tahun 2010 hingga 2022.
2. Untuk tahun 2010–2022, Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara dipengaruhi oleh PDB Harga yang Berlaku, meskipun tidak banyak.
3. Untuk tahun 2010–2022, Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Pemerintah dan Harga yang Berlaku PDB.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius. (2023). Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomijawa Barat Tahun 2011-2020. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.
- Badan Pusat Statistik. Banten dalam Angka, BPS, Provinsi Banten 2014, h.8.
- F Asmuruf, dkk. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Pendudu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15, Nomor 05.
- Gitaningtyas, Yeni Kurniawati dan Kurrohman, Taufik. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Artikel Ilmiah Mahasiswa, Universitas Jember.
- H.M. Aries Djaenuri, 2016, Keuangan Negara dan Daerah (Pendekatan Administrasi), Jakarta.
- Halim, A. (2001). Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasni, H. (2019). Analisis kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota bau-bau. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 2(2), 45-54.
- Idris, I. F. (2016). Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi Banyuasin. European Journal Of Accounting, Auditing And Finance Research.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah, Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Edeisi 3. Jogjakarta : Erlangga.
- Kurniawan, Agus Indriatno; Militina, Theresia dan Suharto, Rachmad Budi. 2017. Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi, pp. 82-91.
- Kustianingsih, N., Andriana, A., & Wardhaningrum, O. (2022). Flypaper effect pada pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di provinsi jawa timur. Financial Jurnal Akuntansi, 8(1), 58-70.
- Melda, H. and Syofyan, E. (2020). Analisis flypaper effect pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di sumatera barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(2), 2826-2838.
- Merri, A. and Soleh, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu. Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3(2).

- Muliati, M., Wulansari, D., & Handoyo, R. (2019). Alokasi anggaran publik dan pengentasan kemiskinan di pulau kalimantan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 371-384.
- Mulyono. (2018). *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mulyono. (2018). *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Munawar, Y. (2021). Respon kebijakan fiskal terhadap siklus bisnis: studi kabupaten/kota di indonesia. *Bina Ekonomi*, 24(1), 1-13.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v4i1.597>.
- Nugroho, F. A. (2018). "Perancangan sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode forward chaining". *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 3(2), 75-79. doi:10.32493/informatika.v3i2.1431.
- Perwira, Ryan; Ridwan dan Fattah, Vitayanti. 2018. Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis*, 6(2), pp. 1-15.
- Pratiwi, Y. and Hutajulu, D. (2022). Analisis pendapatan asli daerah provinsi jawa barat dengan penerapan error correction model. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 26(2), 79-89.
- Purnomo, A. K. (2109). *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Ramli, M. (2022). The Effect of Household Consumption and Government Expenditure on Economic Growth in South Sulawesi 2016-2020 Periode. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/invoice>.
- Rooy, F. De, & Budiarmo, N. (2015). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 2840. <https://doi.org/10.35794/EMBA.3.4.2015.10924>.
- Sari, Nani,dkk. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali Tahun 2003-2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Siregar, S. (2017). *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KENCAN.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunandar, Gufron. (2017). Analisis Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014). Universitas Islam Indonesia.
- Suprayitno, B., Nurseto, T., & Supriyanto, S. (2017). Produktifkah human capital investment oleh pemerintah daerah provinsi dalam era desentralisasi?. *Jurnal Economia*, 13(1), 39.
- Susanti, Hewi; Syechalad, Mohd Nur dan Hamzah, Abubakar 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Aceh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatera Utara Periode 2010-2022

- Tarigan Robinson. M.R.P Ekonomi Regional dan Aplikasi, edisi revisi, 2005, h.18-19.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20689>.
- Triya, A. and Sari, R. (2021). Optimalisasi pendapatan asli daerah dalam rangka meminimalisasi flypaper effect di indonesia. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 388-399.
- Ulumudin, A. and Khaerani, T. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan administrasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap manajemen penagihan pajak untuk mewujudkan pencapaian target pendapatan asli daerah dalam sektor pendapatan pajak hotel dan restoran di kabupaten garut. *Jurnal Publik*, 13(1), 10-19.
- Yogyakarta, A. and Yogyakarta, R. (2021). Flypaper effect dan pengaruhnya terhadap belanja daerah khususnya pada pendapatan asli daerah (pad) dan dana alokasi umum (dau). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 1-13.